

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA ATAS AKTA YANG DI BUATNYA**



Diajukan Oleh:
SA'ADIAH NUR HIZRAH
NIM 2420216320044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
Juni 2026

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ATAS AKTA YANG DI BUATNYA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh
SA'ADYAH NUR HIZRAH
NIM 2420216320044**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
JUNI 2026**

Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
Pada Tanggal 17 Juni 2026

PEMBIMBING



Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji Pada
Tanggal 03 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SA'ADIYAH NUR HIZRAH

NIM : 2420216320044

Program Studi : Magister Kenotariatan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



SA'ADIYAH NUR HIZRAH

NIM. 2420216320044



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diliberkan kepada :

**SA'ADIYAH NUR HIZRAH
NIM. 2420216320044**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS
AKTA YANG DI BUATNYA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 19%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 29 Juni 2026



Mengetahui,
Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM
Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKTA YANG DI BUATNYA

Oleh :

Sa'adiyah Nur Hizrah, M. Hadin Muhjad

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 Halaman

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta- akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani Masyarakat. Pengabdian jabatan notaris berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat atau klien secara mandiri. Notaris dalam menjalankan profesinya, sangat dianjurkan mampu memberikan jasa atau pelayanan tidak hanya dibidang kenotariatan dan ilmu hukum. Diharapkan tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan notaris tersebut. jadi notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam memberikan pelayanan agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait.

Potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan perspektif atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah

satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi adalah aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Penyelesaian konflik dapat dilakukan secara non litigasi yang melibatkan Notaris sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa akta yang pernah dibuatnya, dalam hal ini permasalahannya bukan pada akta otentik namun masalahnya terletak pada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, para pihak yang terlibat memilih dan menunjuk Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan perdamaian. penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah terkait penerapan fungsi Notaris yang ditunjuk sebagai mediator, serta menjadi rujukan bagi pihak yang mengalami permasalahan serupa. Secara yuridis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi atau pembaruan peraturan perundang-undangan terkait fungsi Notaris yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian masalah para pihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang memfokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris sebagai media dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya tidak ada secara eksplisit bahwa notaris dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah akta yang telah dibuatnya, dengan peraturan yang ada yaitu adanya kewajiban notaris untuk penyuluhan hukum maka hal ini dapat menjadi dasar bahwa notaris dapat menjadi media dalam penyelesaian masalah, namun dengan adanya kekaburan ini kekhawatiran dalam konflik kepentingan yang mana akan berdampak pada implikasi hukum yang akan dibuat oleh notaris itu sendiri dalam menjadi mediator dalam sebuah

permasalahan. Maka dengan membuat atau perumusan baru dalam peraturan jabatan notaris yang mana notaris dapat menjadi mediator serta mengatur alur penyelesaian masalah dalam akta dan memberikan ruang juga untuk pengembangan profesi untuk mengemban tugas pelayanan dalam Masyarakat, sehingga Masyarakat yang menunjuk notaris sebagai mediator dapat melakukannya secara professional karena ada aturan yang pasti dan jelas.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKTA YANG DI BUATNYA

Oleh :

Sa'adiyah Nur Hizrah, M. Hadin Muhjad

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 106 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Penyelesaian Sengketa, Akta, Mediator

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya oleh para pihak yang sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dan menganalisa implikasi yang terjadi jika notaris yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris sebagai media dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuatnya tidak ada secara eksplisit bahwa notaris dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah akta yang telah dibuatnya, dengan peraturan yang ada yaitu adanya kewajiban notaris untuk penyuluhan hukum maka hal ini dapat menjadi dasar bahwa notaris dapat menjadi media dalam penyelesaian masalah, namun dengan adanya kekaburan ini kekhawatiran dalam konflik kepentingan yang mana akan berdampak pada implikasi hukum yang akan dibuat oleh notaris itu sendiri dalam menjadi mediator dalam sebuah permasalahan. Maka dengan membuat atau perumusan baru dalam peraturan jabatan notaris yang mana notaris dapat menjadi mediator serta mengatur alur penyelesaian masalah dalam akta dan memberikan ruang juga untuk pengembangan profesi untuk mengemban tugas pelayanan dalam Masyarakat, sehingga Masyarakat yang menunjuk notaris sebagai mediator dapat melakukannya secara professional karena ada aturan yang pasti dan jelas.

NOTARY'S AUTHORITY IN DISPUTE RESOLUTION ON THE DEED HE HAS MADE

By:

Sa'adiyah Nur Hizrah¹, M. Hadin Muhjad²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 106 Pages

ABSTRACT

Keywords : *Notary's Authority, Dispute Resolution, Deed, Mediator*

This research is aimed at analyzing the authority of a Notary who is appointed as mediator in dispute resolution on the deed he has made, appointed by the parties who have consensus to settle their dispute out of the court, and analyzing the implication which may occur if the Notary acting as mediator in dispute resolution upon the deed he has made. The results of the research indicate that the Notary's authority as mediator in dispute settlement on the deed he has made it is not explicitly regulated that a Notary can become mediator to settle the problem of a deed he has made. The existing regulation which obliges the Notaries to carry out legal extension, can become the ground that the Notaries can become mediator in problem solving. However, with the existing vagueness there is a worry on conflict of interest which will have impact on legal implication made by the Notary himself in becoming a mediator in an issue. By making or new formulation in Notary Profession Regulation in which the Notaries can become mediators and regulate the flow of problem solving of the deed and also provides room for the development of social services, so the society who appoint a Notary as a mediator can perform his duty professionally because there is certain and clear regulation.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216320044

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas segala berkah,rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna , oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala kebijakan akademik dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Magister Kenotariatan.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan dukungan selama proses studi.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan pengalaman akademis yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala bantuan administratif dan kemudahan yang diberikan selama proses studi.

6. Orang Tua yang tersayang Ayah Husin Ariadi (Alm) dan Ibu Wahdaniah tercinta, juga adik-adik penulis Muhammad Huda Nur Khahfi dan Muhammad Iqbal Al-Fajar, atas doa yang tidak pernah putus, cinta kasih yang tulus, serta pengorbanan dan dukungan moral maupun materiil yang menjadi landasan kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Teman-teman penulis Terbaik, yaitu, Tri Puspawangi, Taufik Rachman, Aditya Laras Sakti Sudarsono serta rekan-satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, dan menjadi sumbangsih kecil yang berarti bagi masyarakat.

Banjarmasin, 17 Juni 2026



SA'ADYAH NUR HIZRAH

NIM. 2420216320044

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER)	
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	18
C. KEASLIAN PENELITIAN	18
D. TUJUAN PENELITIAN	19
E. MANFAAT PENELITIAN	19
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Konseptual.....	20
1. Kewenangan Notaris.....	20
2. Sengketa dan Penyelesaiannya	22
3. Akta.....	26
B. Tinjauan Teoritik.....	31
1. Teori Kewenangan	31
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	33
3. Teori Kepastian Hukum	37
G. METODE PENELITIAN.....	39
1. Tipe penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian	40
3. Pendekatan Penelitian.....	40
4. Bahan Hukum.....	41
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
6. Analisis Bahan Hukum.....	43
H. SISTEMATIKA PENULISAN	43

BAB II	PENYELESAIAN SENGKETA BAGIAN DARI KEWENANGAN NOTARIS DALAM BERTINDAK SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA	45
A.	Kewenangan Notaris Berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris	45
B.	Kewenangan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris	55
BAB III	IMPLIKASI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA.....	83
A.	Kelayakan Notaris Sebagai Mediator Yang Ditunjuk Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Akta Yang Dibuatnya	83
B.	Akibat Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Mediasi Oleh Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.....	88
BAB IV	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		107